



Dampak Kebijakan Bantuan Sosial terhadap Masyarakat di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2023

Aisyah Sausan Fadhila¹, Tijan²

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Informasi Artikel

Keyword: *Public Policy, Social Welfare, Social Assistance Programs*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak pemberian bantuan sosial BLT DD, BPNT, PKH, dan Bantuan Pangan Beras 10 kg di Desa Wotan. Tujuan dalam studi ini untuk mengetahui pelaksanaan bantuan sosial di Desa Wotan, dampak kebijakan bantuan sosial terhadap masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data meliputi sumber data dan sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi. Analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Implementasi kebijakan bantuan sosial di Desa Wotan menimbulkan dampak positif berupa peningkatan daya beli masyarakat, kualitas hidup, dan akses terhadap pelayanan publik. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan yaitu ketergantungan, penyalahgunaan dana dan data bantuan, serta menjadi beban keuangan negara. Masyarakat merasa bantuan adalah hak yang wajib diberikan dan mendapatkan penghasilan tambahan dengan menjadi penerima bantuan adalah cara yang sah bagi mereka. Aktor politik yang terlibat mengalami miskomunikasi sehingga menjadikan penyaluran bantuan berjalan dengan tidak semestinya. Selain itu penelitian menunjukkan hasil bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi mulai dari faktor ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Kesejahteraan Sosial, Program Bantuan Sosial

ABSTRACT

This study examines the impact of providing social assistance BLT DD, BPNT, PKH, and 10 kg Rice Food Assistance in Wotan Village. The purpose of this study is to find out the implementation of social assistance in Wotan Village, the impact of social assistance policies on the community and the factors that affect it. This research uses a qualitative approach. Data sources include data sources and secondary, data collection techniques using interviews, observations, and documentation. The data validity technique used is the triangulation technique. Data analysis through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion making. The implementation of social assistance policies in Wotan Village has a positive impact in the form of increasing people's purchasing power, quality of life, and access to public services. Meanwhile, the negative impacts caused are dependence, misuse of aid funds and data, and become a financial burden on the state. The community feels that assistance is a right that must be given and getting additional income by becoming a recipient of assistance is a legitimate way for them. The political actors involved experienced miscommunication, making the distribution of aid run inappropriately. In addition, research shows that there are various factors that affect ranging from economic, political, cultural, and educational factors.

Keyword: *Public Policy, Social Welfare, Social Assistance Programs*

PENDAHULUAN

Kesejahteraan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu negara. Kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan meningkatnya kualitas kehidupan dan taraf hidup sebuah keluarga. Keluarga dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi berarti memiliki kualitas hidup yang lebih (Oktriawan et al., 2021). Kualitas hidup yang meningkat salah satunya ditandai dengan menurunnya tingkat kemiskinan dan keterbelakangan. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan melepaskan belenggu kemiskinan.

Permasalahan tentang kemiskinan masih menjadi hambatan besar negara kita dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Kemiskinan di Indonesia seakan-akan tidak mengalami perubahan karena dalam realitanya, penduduk miskin masih banyak ditemui di sekitar kita. Presentase penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2023 sebesar 9,36% dengan jumlah 23,90 juta orang. Presentase yang ada mengalami penurunan 0,18% dari Maret 2022 (Badan Pusat Statistik, 2023). Meskipun demikian, jumlah penduduk miskin di Indonesia tetaplah tinggi. Di Jawa Tengah sendiri presentase penduduk miskin mencapai 10,77% dengan jumlah 3,79 juta orang. Sedangkan di Kabupaten Pati terdapat 118 ribu jiwa lebih atau sekitar 9,31% penduduk yang masuk dalam kategori miskin (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2023).

Kemiskinan diartikan sebagai keadaan tidak mampu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemiskinan juga berkenaan dengan suatu keadaan yang dapat diukur dengan mendefinisikan ukuran kesejahteraan individu. Orang-orang yang hidup dalam kemiskinan mereka menghadapi banyak kekurangan dan kurang beruntung secara sosial dan ekonomi sehingga jauh dari kemakmuran (Olsson, et al., 2014).

Perlindungan sosial menjadi komponen utama untuk mencapai kelayakan hidup

masyarakat (Torm & Oehme, 2024). Salah satu wujud nyata adanya program perlindungan sosial yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin. Bantuan sosial diberikan dalam rangka meningkatkan daya beli melalui pemenuhan dasar kebutuhan hidup pokok masyarakat miskin. Sebagai program kebijakan jangka pendek, bantuan sosial akan habis dalam waktu singkat karena sifatnya yang konsumtif. Hal ini menjadikan pemberian bantuan sosial tidak dapat terus menurun disalurkan karena dapat mengikis anggaran dan menambah utang negara. Pemberian bantuan sosial yang dibatasi akan menimbulkan permasalahan lain bagi penerimanya.

Kondisi masyarakat penerima bantuan sosial akan relatif sama sebab timbul rasa nyaman dan aman karena rutin menerima bantuan sosial setiap bulannya. Fenomena tersebut dapat diartikan sebagai kondisi ketergantungan pada bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang masuk dalam kategori miskin. Ketergantungan timbul dari adanya persepsi bahwa bantuan sosial yang adalah kewajiban yang harus diberikan oleh pemerintah secara rutin.

Banyak pihak yang berperan serta dalam implementasi kebijakan bantuan sosial, tidak hanya pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah dan desa. Pemerintah daerah dan desa memiliki pengaruh besar dalam perancangan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan terkait kebijakan di wilayahnya (Magontier et al., 2024). Besarnya perhatian dari pemerintah inilah yang menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat akan adanya persepsi bahwa bansos yang diterima adalah gaji sehingga mereka akan ketergantungan pada bansos tersebut (Iqbal & Marto, 2022). Maka dari itu dibutuhkan penerapan strategi pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat miskin sehingga meningkat kapasitas perekonomiannya. Masyarakat miskin tidak hanya menggunakan bantuan sosial untuk kebutuhan pokok saja, namun juga berupaya mengubah dirinya agar bisa bangkit dari kategori miskin dan tidak

sejahtera dengan pemanfaatan bantuan untuk membangun sebuah usaha.

Prasyarat penerima bantuan sosial rata-rata adalah masyarakat yang terdata dalam data layak bansos. Mereka masuk dalam kategori miskin walaupun dalam realitanya keadaan mereka tidak layak mendapatkan bantuan sosial. Meskipun demikian, masih banyak masyarakat yang merasa nyaman dengan mengandalkan bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Masyarakat memiliki asumsi dan pandangan yang berbeda-beda dalam menanggapi adanya kebijakan yang diberikan pemerintah di mana mereka telah mengkalkulasi strategi sebagai penerima. Dari sini menjadikan penerapan strategi kedua yaitu pemberdayaan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat tidak dapat terealisasi secara maksimal.

Dalam penelitian kali ini peneliti ingin membahas lebih tentang kajian kualitatif yang fokus pada dampak implementasi kebijakan bantuan sosial terhadap masyarakat dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Alasan dipilihnya Desa Wotan menjadi lokasi penelitian karena jumlah masyarakat yang menerima bantuan sosial relatif banyak dan cenderung tetap setiap tahunnya. Banyak permasalahan lain yang terjadi termasuk penyalahgunaan bantuan sosial yang perlu dicari tahu akar penyebabnya. Penelitian ini menjadi penting dan menarik karena dapat membantu pemerintah untuk merevisi dan menyusun ulang kebijakan bantuan sosial yang lebih efektif. Selain itu muncul pengetahuan baru yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Penelitian tentang dampak bantuan sosial di Desa Wotan merupakan penelitian yang baru pertama kali dilakukan. Maka dari itu, penelitian ini akan memberikan banyak pengaruh dalam kehidupan sosial politik masyarakat Desa Wotan. Penelitian yang dilakukan melibatkan analisis kajian melalui sudut pandang pemerintah daerah dan desa serta masyarakat miskin penerima bantuan sosial.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan metode penelitian

kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Wotan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam memastikan keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi serta dianalisis dengan menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Sosial di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tahun 2023

A. Perencanaan

Tahapan perencanaan dimulai dari proses identifikasi masalah sosial yang dirasa mendesak dan perlu ditangani secepatnya dengan melibatkan berbagai organisasi formal di lingkup nasional maupun lokal (Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati, Pendamping PKH, dan Pemerintah Desa Wotan) serta peran dari masyarakat itu sendiri. Kemudian permasalahan yang ditemukan ditangani melalui kebijakan bantuan sosial dengan diawali proses perumusan tujuan dan sasaran program yang ditetapkan melalui desa dan disusun menjadi satu kesatuan data dan informasi penerima pada Aplikasi SIKS-NG sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kemudian ditetapkan tujuan pemberian bantuan sosial yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai program pelayanan yang membantu masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan mendasar.

Dilanjutkan dengan proses penyusunan anggaran dana di mana anggaran dana Program Keluarga Harapan atau PKH, Bantuan Pangan Beras 10 kg, dan Bantuan Pangan Non-Tunai berasal dari APBN sedangkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLT DD berasal dari alokasi sumber dana desa. Selanjutnya proses pemilihan jenis bantuan yang sesuai dengan Desa Wotan yang disalurkan dalam bentuk uang tunai (BLT DD), Bantuan Beras 10 kg, dan non tunai dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

B. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dimulai dari melakukan penyaluran bantuan sesuai dengan mekanismenya masing-masing dan sosialisasi terhadap masyarakat penerima bantuan tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip kebijakan. Dalam penyaluran bantuan yang dilakukan di Desa Wotan terjadi miskomunikasi antara Pemerintah Desa dengan pihak Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati dan Pendamping PKH. Pemerintah Desa Wotan menyatakan bahwa semua wewenang perubahan data penerima bantuan ada di tangan pemerintah pusat, namun dari pihak Dinsos P3AKB Kabupaten Pati dan Pendamping PKH Desa Wotan menyatakan bahwa semua wewenang ada di bawah yaitu pemerintah desa.

Pada dasarnya wewenang yang benar dan sesuai adalah pada pemerintah daerah/desa. Hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Pasal 9 Ayat 3 tentang Penanganan Fakir Miskin menyebutkan bahwa “Pemerintah desa atau nama lain yang sejenis wajib melakukan pendaftaran atau perubahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) kepada bupati/walikota melalui camat”. Pemutakhiran DTKS itu kewenangan daerah sesuai ketentuan prosesnya dimulai dari musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Lalu secara berjenjang naik ke atas. Jadi, pemerintah daerah dan jajarannya sampai tingkat desa atau kelurahan memiliki kewenangan penuh menentukan siapa yang layak menerima bantuan dan siapa yang tidak. Dari sini dapat dilihat yang sesuai adalah pernyataan dari pihak Dinsos P3AKB Kabupaten Pati dan Pendamping PKH Desa Wotan yang menyatakan bahwa semua wewenang ada di pemerintah desa baru setelahnya naik ke tingkat kecamatan dan kabupaten atau kota.

C. Monitoring dan Evaluasi

Tahapan akhir setelah bantuan disalurkan di mana aktor politik yang terlibat berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan program dan mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial. Seperti halnya yang telah

dijelaskan sebelumnya bahwa keterlibatan aktor yang belum profesional dalam melibatkan peran serta masyarakat atas kebijakan bantuan sosial yang diberikan. Proses sosialisasi yang menjadi titik terpenting keberhasilan program, dilaksanakan dengan tidak merata dan rutin. Kegiatan sosialisasi akan berpengaruh besar kepada pemahaman masyarakat terkait bantuan yang disalurkan.

Prinsip yang melekat pada masyarakat tergantung pada sering tidaknya sosialisasi dilakukan. Semakin sering dilakukan maka masyarakat penerima semakin paham konsep pemberian bantuan yang sifatnya temporer dan seiring berjalannya waktu mereka harus lebih berdaya dan bersedia melangkah bersama ke arah yang lebih baik. Keberhasilan kegiatan sosialisasi akan menentukan masih layak atau tidaknya penerima bantuan. Di Desa Wotan sendiri kelulusan yang terjadi adalah kelulusan alamiah yaitu meninggal atau mengundurkan diri. Padahal kelulusan yang harusnya terjadi adalah kelulusan karena perubahan ekonomi penerima yang semakin membaik berkat bantuan yang diberikan. Sehingga bantuan dapat dialihkan kepada masyarakat lain yang lebih membutuhkan.

2. Dampak Kebijakan Bantuan Sosial terhadap Masyarakat di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

A. Dampak Positif

Dampak positif yang terjadi dan ditemukan di Desa Wotan yaitu meningkatkan taraf kesejahteraan atau kualitas dan kelangsungan hidup penerimanya yang ditandai dengan kemampuan penerima dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dampak positif yang dirasakan oleh penerima bantuan ditandai dengan peningkatan kemampuan mereka dalam membeli kebutuhan harian dan akses terhadap pendidikan serta kesehatan. Semula yang kesulitan membayar SPP anak menjadi lebih mudah berkat bantuan yang diterima. Begitu pula dalam hal mengakses kesehatan di mana mereka menjadi mampu berobat dan memperhatikan kesehatan tubuh berkat bantuan yang diberikan.

B. Dampak Negatif

Dampak negatif yang terjadi dan ditemukan di Desa Wotan yaitu ketergantungan di mana penerima merasa bantuan adalah hak yang harus diberikan oleh negara. Masyarakat penerima terjebak dalam bantuan. Mereka mempertanyakan, mengharapkan bansos yang belum kunjung diterima. Penerima bantuan sosial banyak yang dikatakan mampu dan merupakan orang menengah ke atas. Mereka memiliki kendaraan yang bagus baik itu roda dua dan sebagian ada pula yang memiliki mobil atau truk. Sebagian besar dari mereka telah mendapatkan bantuan lebih dari 5 tahun lamanya. Meskipun demikian banyak dari mereka yang tidak mengupayakan untuk mengundurkan diri dari penerima sehingga bantuan sosial yang ada benar-benar direalisasikan kepada mereka yang dikategorikan miskin atau tidak mampu.

Selain itu terdapat dampak lain yang terjadi yaitu penyalahgunaan bantuan baik dari dana maupun data. Penyelewengan dana bantuan yang dimaksud di sini yaitu digunakan untuk membayar utang dan jajan. Beberapa oknum penerima bantuan beras 10 kg juga menjual berasnya dengan dalih beras yang diberikan kutuan. Padahal memang sejatinya setiap menerima bantuan beras 10 kg, mereka akan menjualnya karena merasa sudah memiliki beras yang lebih layak dan lebih berguna uang hasil penjualan berasnya dibanding beras yang diberikan. Selain penyalahgunaan terkait dana, terdapat pula penyelewengan data yang ditandai dengan keajegan data dari tahun ke tahun. Padahal sejatinya penerima bantuan telah mengalami perbaikan kondisi ekonomi.

Pemberian bantuan sosial yang besar dan terus-menerus bisa menjadi beban berat bagi keuangan negara. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa mengganggu anggaran negara. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menimbulkan masalah ekonomi yang lebih besar, seperti inflasi atau krisis utang.

3. Faktor yang Memengaruhi Dampak Kebijakan Bantuan Sosial terhadap Masyarakat di Desa Wotan Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Faktor yang memengaruhi dampak yang terjadi bukan hanya dari segi internal masyarakat penerima itu sendiri melainkan juga dari faktor eksternal yaitu pemerintah sebagai perumus kebijakan bantuan sosial ini. Faktor internal dan eksternal yang memengaruhi dampak kebijakan bantuan sosial terhadap masyarakat Desa Wotan berkaitan dengan norma, jalinan kepercayaan, dan jalinan kerja sama yang dijadikan kebijakan dalam menjunjung efektifitas dan kualitas masyarakat melalui tindakan yang difasilitasi secara tertata.

Pertama norma yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan norma yang turun ke generasi selanjutnya. Masyarakat Desa Wotan menganggap jika seorang keluarga berada dalam kesulitan ekonomi, maka mereka berhak mendapatkan bantuan. Mereka juga merasa menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga mereka tidak perlu melakukan perubahan apapun untuk berusaha keluar dari penerima bantuan. Pemahaman ini secara tidak langsung akan tumbuh dan turun ke generasi berikutnya bahwa ini adalah salah satu cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan mereka, tanpa melihat potensi lebih mandiri.

Kepercayaan juga memengaruhi sudut pandang masyarakat dalam memandang bantuan sosial yang ternyata dipandang sebagai bantuan jangka panjang bukan bantuan sementara. Selain itu masyarakat Desa Wotan memiliki kepercayaan penuh kepada pemerintah desa atas segala tindakan yang dilakukan. Hal ini juga didukung oleh jaringan sosial yang menjadi salah satu faktor lain yang memengaruhi masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bagaimana bantuan yang ada direalisasikan dan memunculkan adanya kepercayaan kepada pemerintah desa. Hal ini selaras dengan adanya unsur ekonomi dan politik di dalamnya. Terdapat peran politik yang memengaruhi penetapan penerima dan penyaluran bantuan. Janji masa kampanye yang ditetapkan oleh kepala desa menjadikan penyaluran bantuan menghadapi kendala ketakutan untuk melakukan verifikasi dan validasi data karena penerima merupakan

pendukung, saudara, atau punya hubungan lain yang dekat dengan pemerintah desa khususnya dengan kepala desa.

Selain faktor ekonomi, politik, dan budaya yang telah disebutkan, ditemukan pula faktor lain yang memengaruhi yaitu rendahnya pendidikan yang ada di Desa Wotan. Pola pikir tradisional masih mendominasi perkembangan sumber daya manusia di Desa Wotan. Maka dari itu muncul kesulitan tersendiri dalam menghadapi sumber daya manusia yang demikian.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan bantuan sosial di Desa terdiri dari proses perencanaan, melalui proses identifikasi, proses perumusan tujuan dan sasaran, penyusunan anggaran dana. Kedua pelaksanaan, dimulai dari melakukan penyaluran bantuan secara langsung di Balai Desa Wotan untuk bantuan BLT DD dan Bantuan Pangan Beras 10 kg. Penyerahan secara tidak langsung atau melalui KKS non tunai untuk PKH dan BPNT. Penyaluran bantuan sosial beriringan dengan sosialisasi. Namun dalam praktiknya tidak dilaksanakan rutin. Ketiga evaluasi dan monitoring oleh aktor politik yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan mengevaluasi efektivitas program bantuan sosial. Evaluasi dan monitoring yang sejauh ini sudah terlaksana hanya sebatas melihat bagaimana gejolak kehidupan KPM dari segi perkembangan gaya hidup mereka. Bukan dilandaskan oleh pemberdayaan yang menunjukkan kemandirian, namun alasan lain seperti kematian dan pengunduran diri dari KPM yang bersangkutan.
2. Dampak kebijakan bantuan sosial di Desa Wotan. 1) Dampak positif yang ditandai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup

penerima. Sedangkan dampak negatif munculnya ketergantungan dari para penerima bantuan di mana mereka merasa bantuan adalah hak yang harus diberikan oleh negara. Selain itu terjadi penyalahgunaan bantuan terkait dengan penggunaan dana dan data penerima yang tidak akurat, serta menjadi beban keuangan negara jika diimplementasikan terus menerus dapat menimbulkan masalah ekonomi yang lebih besar.

3. Faktor yang memengaruhi kebijakan bantuan sosial di Desa Wotan. 1) Faktor ekonomi, bantuan sosial yang diberikan merupakan salah satu hal yang ditunggu-tunggu masyarakat untuk dibelanjakan untuk kebutuhan hariannya. 2) Faktor politik, adanya jaringan sosial antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan tersebut dan faktor politik lain seperti kepercayaan atas janji politik ketika kampanye. 3) Faktor budaya, adanya anggapan dalam masyarakat bahwa mereka berhak mendapatkan bantuan karena merasa menjadi tanggung jawab pemerintah dan ini menjadi salah satu cara yang sah untuk memenuhi kebutuhan mereka, tanpa melihat potensi lebih mandiri. 4) Faktor pendidikan, pendidikan yang rendah menimbulkan perspektif tradisional yang menjadi tantangan tersendiri dalam menyalurkan bantuan di Desa Wotan.

SARAN

1. Pemerintah Desa Wotan

Pemerintah Desa Wotan diharapkan dapat mengevaluasi kebijakan bantuan sosial lebih dengan lebih sering berkoordinasi dengan pihak lain yaitu Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati dan Kemensos melalui pendamping agar terjalin komunikasi yang baik dan menghantarkan pada realisasi bantuan yang sesuai dengan ketentuan, tujuan, dan sasaran.

2. Peneliti lain

Penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya di mana dapat membahas lebih lanjut terkait pemberdayaan masyarakat sampai saat ini belum terlaksana di Desa Wotan dan prosedur Aplikasi SIKS-NG yang masih banyak terjadi kendala. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian sejenis dengan ranah

yang telah disebutkan sebelumnya di lokasi yang sama maupun di berbagai lokasi lain.

3. Masyarakat Desa Wotan

Masyarakat Desa Wotan dapat menindaklanjuti permasalahan yang ada dengan melakukan pelaporan kepada pihak yang berwenang. Penerima bantuan juga dapat menegur pendamping dan pemerintah desa jika sosialisasi yang seharusnya dilakukan rutin atau tidak kunjung dilaksanakan. Mereka juga dapat berdiskusi dengan pemerintah desa untuk mencari solusi terbaik dari sudut pandang pemerintah desa, penerima bantuan, dan non penerima bantuan. Masyarakat harus lebih sadar diri akan kondisi ekonomi keluarganya. Jikalau sudah merasa mampu maka hendaknya melakukan pelaporan diri kepada pihak desa maupun pendamping untuk digraduasi dari penerima bantuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. (2023). Kecamatan Sukolilo dalam Angka 2023.
- Iqbal, M., & Marto, H. (2022). Edukasi Pengelolaan Keuangan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Nalu Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli. *Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat Dan ...*, 02(September), 743–750. <http://ejurnal.pps.ung.ac.id/index.php/dikmas/article/view/1496>
- Lennart Olsson, Maggie Opondo, Petra Tschakert, Arun Agrawal, Siri Eriksen, Shiming Ma, Leisa Perch, S. Z. (2014). *Livelihoods and Poverty Coordinating Lead Authors : Lead Authors :*
- Contributing Authors : Review Editors : 793–832.
- Magontier, P., Solé-Ollé, A., & Viladecans-Marsal, E. (2024). The political economy of coastal development. *Journal of Public Economics*, 238(May 2023). <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2024.105178>
- Oktriawan, W., Adriansah, A., & Alisa, S. (2021). Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta. *Lisyabab : Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 2(2), 199–210. <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i2.96>
- Torm, N., & Oehme, M. (2024). Social protection and formalization in low- and middle-income countries: A scoping review of the literature. *World Development*, 181(118), 106662. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2024.106662>